

Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara

Analysis of Presentation of the Budget Realization Report Based on Government Accounting Standards at the Office of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of the Sula Islands Regency, North Maluku

Sudaryatmo Bafagehi, Ventje Ilat, Dhullo Afandi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

e-mail.com; Sudaryatmob@gmail.com, ventje_ilat@unsrat.ac.id, DhulloAfandi@gmail.com

Abstrak: (Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan kompleksitas sosial. Adapun berikut merupakan data hasil wawancara dengan beberapa narasumber di BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, Dalam Penyusunan laporan realisasi dan anggaran pemerintah merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara beberapa sub bagian di dalam instansi. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran hingga publikasi laporan realisasi dan anggaran. Sebagai prinsip dasar, instansi harus mengikuti standar akuntansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan dan realisasi anggaran, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, proses penyusunan laporan realisasi dan anggaran juga dihadapkan dengan beberapa kendala, seperti keterbatasan SDM dan teknologi, ketidaktepatan pencatatan transaksi, dan kompleksitas sistem akuntansi. Keterbatasan SDM dan teknologi dapat menghambat efisiensi dan efektivitas proses penyusunan laporan realisasi dan anggaran. Dalam hal ini, instansi perlu memperkuat SDM dan teknologi yang dimiliki untuk memastikan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan baik dan akurat.

Kata kunci: Analisis anggaran, Realisasi Anggaran, Laporan keuangan.

Abstract: (*The Budget Realization Report presents information on the realization of income, spending, transfers, surplus/deficit and financing, each of which is compared to its budget in one period. The objective of this study is to analyze the suitability of presenting the Budget Realization Report of the BPKAD of Sula Islands Regency North Maluku based on Government Accounting Standards. The type of research used in this research is qualitative research with a descriptive approach. Qualitative research is research that is descriptive in nature and tends to use analysis. Qualitative research aims to gain in-depth understanding, develop theories, describe reality, and social complexities. The following is data from interviews with several informants at BPKAD, Sula Islands Regency, North Maluku regarding the Presentation of Budget Realization Reports Based on Government Accounting Standards. . The process consists of several stages, starting from budget planning to publication of realization reports and budgets. As a basic principle, agencies must follow government accounting standards in presenting financial reports and budget realization, as stipulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance and Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. However, the process of compiling realization and budget reports was also faced with several obstacles, such as limited human resources and technology, inaccuracies in recording transactions, and the complexity of the accounting system. Limited human resources and technology can hinder the efficiency and effectiveness of the process of preparing reports and budget realization. In this case, agencies need to strengthen their human resources and technology to ensure that transaction recording and preparation of financial reports can be carried out properly and accurately.*

Keyword : Budget analysis, Budget Realization, Financial reports.

PENDAHULUAN

Diterima: 15-06-2023; Disetujui untuk Publikasi: 28 -06-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran II 03 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Tujuan dari penetapan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah penetapan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Melalui penyusunan laporan realiasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil akhir laporan realisasi anggaran ini kemudian akan dipindahkan ke neraca kelompok ekuitas dana lancar. Laporan realisasi anggaran harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). LRA dinyatakan dalam PSAP No.2 tentang laporan realisasi anggaran. PSAP ini berisikan prinsip-prinsip mengenai LRA. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Berbagai peraturan yang sudah ditetapkan, tentunya pemerintah menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian dan pengelolaan laporan keuangan Pemerintah. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II. 03 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran tentang Periode Laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Penelitian ini hanya mengambil Laporan Realisasi Anggaran saja dengan alasan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling utama. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan mencoba melihat penyajian penyusunan Laporan Realisasi anggaran yang disusun oleh kantor BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara yang meliputi hasil dan Proses kegiatan penganggaran antara lain kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PSAP No 02 serta bukti-bukti pendukungnya.

(Sujarweni, 2020: 2). Akuntansi adalah kegiatan atau proses pencatatan (record), penggolongan (classifying), peringkasan (summerizing) transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada suatu organisasi dan melaporkan atau menyajikan serta menafsirkan (Interpret) hasilnya. Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) menyatakan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. (Sujarweni, 2020:2).

Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni, 2019: 18). . Jenis yang dicatat dalam akuntansi pemerintah adalah transaksi keuangan pemerintah. (Hasanah dan Fauzi, 2017 : 1).

Menurut Halim dan Kusufi (2018:48) anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disembunyikan dalam ukuran moniter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Menurut Hasanah dan Fauzi (2017: 129-131) Pengertian Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai.

Pengertian Realisasi Anggaran Menurut Gege Edy Prasetya dalam bukunya yang berjudul Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa "Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan (2019: 6)".

Laporan Realisasi Anggaran Menurut Hasanah dan Fauzi (2016:17) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya dan keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, dalam suatu periode pelaporan.

Penelitian Terdahulu

Fitriani (2021) Tentang Penerapan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Sudah Sesuai PP 71 Tahun 2010 Pada Kantor Camat Batui Kabupaten Banggai. Hasil penelitian, hasil penelitian terlihat bahwa data

laporan keuangan dan realisasi anggaran di Kecamatan Batui sudah mencapai target yang telah disepakati serta mengalami peningkatan dari anggaran yang telah ditetapkan, Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh SKPD Kecamatan Batui menyajikan Laporan yang sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dimana biaya yang ditampilkan dalam LRA adalah Pendapatan, Belanja, ransfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan SiLPA/SiKPA.

Anastasia Friska Palilingan (2015) Tentang Analisis Kinerja Belanja Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Hasil Penelitain, Kinerja pendapatan pemerintah Kota Manado dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan Kota Manado tahun 2009-2013 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan pendapatan dan PAD positif. Pertumbuhan PAD kota Manado dari tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan.

Marlena, Retno Murnisari, dan Nikita Larasati (2022) Tentang Analisis Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Anggaran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung periode 2019-2021 dikatakan sangat efektif. Karena data-data yang telah peroleh peneliti sudah diolah dan mendapatkan hasil yang baik pula.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memilih pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

Tempat pelaksanaan penelitian ini pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai dengan selesai.

Jenis Data. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar atau video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman dan lain-lain. Data kualitatif yang akan dikumpulkan oleh peneliti untuk membantu penelitian ini adalah data Laporan realisasi anggaran berupa pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan.

Sumber Data. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan baik melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak informan. Untuk data sekunder diperoleh itu berupa bukti, catatan atau laporan historis tentang anggaran kegiatan keuangan yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

Metode Pengumpulan Data. 1. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyiapkan pertanyaan lengkap dan terperinci seputar tujuan penelitian dan akan ditanyakan langsung 2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan dokumen yang bersumber dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021

No. Urut Ref	URAIAN	Anggaran (2021)	Realisasi (2021)
5.1.1	PENDAPATAN		
5.1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.377.730.252	5.159.780.755
5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	10.203.210.611	5.834.296.450
5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.796.951.769	1.121.812.830

5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	10.226.203.009	4.096.932.283
	JUMLAH	29.604.095.641	16.212.822.319
5.1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER		
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
5.1.1.2.1.1	Dana Perimbangan	619.291.784.000	615.760.576.674
5.1.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	24.577.175.000	24.577.175.000
5.1.1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	-	1.480.000.000
5.1.1.2.1.4	Dana Desa	78.326.387.000	168.109
5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
5.1.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	11.738.209.077	8.062.962.024
	JUMLAH	733.933.555.077	649.880.881.807
5.1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	-	25.234.262.638
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.203.800.000	-
	JUMLAH	18.203.800.000	25.224.262.638
	JUMLAH PENDAPATAN	781.741.450.718	691.327.966.764
5.1.2	BELANJA		
5.1.2.1	BELANJA OPERASI		
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	268.954.736.311	264.229.075.227
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	272.503.535.902	247.747.621.062
5.1.2.1.3	Belanja Subsidi	1.000.000.000	950.400.000
5.1.2.1.4	Belanja Hibah	1.701.749.200	1.682.183.600
	JUMLAH	544.160.021.413	514.609.279.889
5.1.2.2	BELANJA MODAL		
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	199.983.500	-
5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.246.272.088	19.083.475.428
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.679.854.938	33.974.827.113
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.061.668.990	12.866.744.440
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	917.001.300	868.059.600
	JUMLAH	112.104.780.816	66.793.106.581
5.1.2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.1.2.3.	Belanja Tidak Terduga	28.597.041.903	28.597.041.903
	JUMLAH	28.597.041.903	28.597.041.903
5.1.2.4	BELANJA TRANSFER		
5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.508.094.086	920.306.480
5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	126.426.768.700	49.588.943.216
	JUMLAH	127.934.862.786	50.509.249.696
	JUMLAH BELANJA	812.798.708.918	880.508.878.089
	SURPLUS / (DEFISIT)	31.055.256.200	30.819.288.695
5.1.3	PEMBIAYAAN		
5.1.3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
5.1.3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.555.256.200	32.271.549.788
	JUMLAH PENERIMAAN	32.555.256.200	32.271.549.788

5.1.3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
5.1.3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN	1.500.000.000	1.500.000.000
5.1.3.3	PEMBIAYAAN NETTO	31.055.256.200	30.771.549.788
5.1.3.4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	61.590.838.483

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. 2023

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021

No. Urut Ref	URAIAN	Anggaran (2021)	Realisasi (2021)
5.1.1	PENDAPATAN		
5.1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.377.730.252	5.159.780.755
5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	10.203.210.611	5.834.296.450
5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.796.951.769	1.121.812.830
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	10.226.203.009	4.096.932.283
	JUMLAH	29.604.095.641	16.212.822.319
5.1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER		
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
5.1.1.2.1.1	Dana Perimbangan	619.291.784.000	615.760.576.674
5.1.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	24.577.175.000	24.577.175.000
5.1.1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	-	1.480.000.000
5.1.1.2.1.4	Dana Desa	78.326.387.000	168.109
5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
5.1.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	11.738.209.077	8.062.962.024
	JUMLAH	733.933.555.077	649.880.881.807
5.1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	-	25.234.262.638
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.203.800.000	-
	JUMLAH	18.203.800.000	25.224.262.638
	JUMLAH PENDAPATAN	781.741.450.718	691.327.966.764

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. 2023

Tabel 3. Laporan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021

No. Urut Ref	URAIAN	Anggaran (2021)	Realisasi (2021)
5.1.2	BELANJA		
5.1.2.1	BELANJA OPERASI		
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	268.954.736.311	264.229.075.227
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	272.503.535.902	247.747.621.062

5.1.2.1.3	Belanja Subsidi	1.000.000.000	950.400.000
5.1.2.1.4	Belanja Hibah	1.701.749.200	1.682.183.600
	JUMLAH	544.160.021.413	514.609.279.889
5.1.2.2	BELANJA MODAL		
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	199.983.500	-
5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.246.272.088	19.083.475.428
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.679.854.938	33.974.827.113
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.061.668.990	12.866.744.440
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	917.001.300	868.059.600
	JUMLAH	112.104.780.816	66.793.106.581
5.1.2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.1.2.3.	Belanja Tidak Terduga	28.597.041.903	28.597.041.903
	JUMLAH	28.597.041.903	28.597.041.903
5.1.2.4	BELANJA TRANSFER		
5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.508.094.086	920.306.480
5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	126.426.768.700	49.588.943.216
	JUMLAH	127.934.862.786	50.509.249.696
	JUMLAH BELANJA	812.798.708.918	880.508.878.089

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. 2023

Tabel 4. Laporan Surplus / Defisit Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021

No.	URAIAN	Anggaran (2021)	Realisasi (2021)
1	PENDAPATAN DAERAH	781.741.450.718	691.327.966.764
2	BELANJA DAERAH	812.798.708.918	880.508.878.089
3	SURPLUS / (DEFISIT)	31.055.256.200	30.819.288.695

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. 2023

4.2 Pembahasan

Tabel 5. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara	Keterangan
Penyajian Informasi realisasi LRA	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan.	Sesuai
Pengidentifikasian LRA	Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: nama	Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang jelas berupa nama entitas, satuan angka serta cakupan lain dalam laporannya.	Sesuai

	entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; cakupan entitas pelaporan; periode yang dicakup; mata uang pelaporan; dan satuan angka yang digunakan.		
Periode Laporan	Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekali dalam setahun.	Sesuai
Ketepatan Waktu penyajian	entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Adapun Laporan Realisasi Anggaran BPKAD selalu menyajikan laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Sesuai

Sumber : Hasil Olahan data, 2023

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara dan PSAP Nomor 02 sesuai dengan indikator yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. Kedua laporan menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam hal ini, BPKAD kepulauan Sula selalu menyajikan LRA sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa LRA BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam PSAP Nomor 02 dan memenuhi indikator yang diatur terkait penyajian informasi realisasi LRA, pengidentifikasian LRA, periode laporan, dan ketepatan waktu penyajian.

Tabel 6. Perbandingan Pendapatan (LRA) BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara	Keterangan
Pengakuan	Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.	Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas BPKAD Kepulauan Sula.	Sesuai
Penerimaan transfer	Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.	Pencatatan pelaporan pendapatan atau transfer masuk dari pemerintah pusat tercatat dalam pelaporan pendapatan LRA	Sesuai
Pengukuran	Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	Dalam pencatatannya pelaporan pendapatan LRA sudah mencatat bagian-bagian yang masuk dalam azas bruto dalam penyajiannya	Sesuai
Penyajian dan pengungkapan	Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi	Akuntansi pendapatan yang disusun dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk memberikan informasi pengendalian yang diperlukan oleh	Sesuai

	manajemen pemerintah pusat dan daerah.	manajemen pemerintah pusat dan daerah.	
--	--	--	--

Sumber : Hasil Olahan data, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 membandingkan pelaporan pendapatan antara PSAP Nomor 02 dan LRA BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan pendapatan dari kedua entitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, mengenai pengakuan pendapatan, baik PSAP Nomor 02 maupun LRA BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara mengakui pendapatan pada saat diterima pada rekening kas masing-masing entitas. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang mengharuskan pendapatan diakui pada saat terjadi penyerahan barang atau jasa atau saat diterima. Kedua, terkait penerimaan transfer, PSAP Nomor 02 dan LRA BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara sama-sama mencatat penerimaan transfer masuk dari entitas pelaporan lain seperti pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaporan pendapatannya. Dalam hal ini, kedua entitas sudah mencatat bagian-bagian yang masuk dalam azas bruto dalam penyajiannya. Terakhir, terkait penyajian dan pengungkapan, baik PSAP Nomor 02 maupun LRA BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara menyusun laporan pendapatan dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan informasi pengendalian yang diperlukan oleh manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Tabel 7. Perbandingan Belanja (LRA) BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA BPKAD kepulauan Sula	Keterangan
Pengakuan	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.	Adapun dalam pelaporannya BPKAD mencantumkan apa saja biaya belanja yang ada di dalam pelaporan dan di akui	Sesuai
Pengukuran	Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.	Dalam konteks ini, pengakuan pengeluaran oleh bendahara pengeluaran merujuk pada pencatatan pengeluaran dalam catatan keuangan pemerintah. Pengesahan oleh unit perbendaharaan merujuk pada proses pemeriksaan dan persetujuan atas pengeluaran yang dilakukan oleh unit tersebut sebelum pengeluaran tersebut diakui dan dicatat dalam catatan keuangan. Dengan demikian, proses pengakuan pengeluaran oleh bendahara pengeluaran akan terjadi setelah pengeluaran tersebut disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran yang dicatat dalam catatan keuangan telah melalui proses verifikasi dan validasi yang memadai.	Sesuai
Klasifikasi	Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.	Adapun dalam pencatatannya BPKAD mengklasifikasi pencatatan dalam beberapa bagian seperti, Belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.	Sesuai
Transfer	Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan	dalam pencatatannya BPKAD mencatat transfer keluar dalam bagian Belanja Tranfer, sehingga	Sesuai

	lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.	pengeluaran apapun yang dilakukan di catat dalam bagian tersebut.	
--	---	---	--

Sumber : Hasil Olahan data, 2023

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada aspek pengukuran belanja, PSAP Nomor 02 mengakui pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sedangkan dalam LRA BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, pengakuan pengeluaran oleh bendahara pengeluaran terjadi setelah pengeluaran tersebut disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengeluaran yang dicatat dalam catatan keuangan telah melalui proses verifikasi dan validasi yang memadai. Dalam keseluruhan, pelaporan belanja dalam LRA BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengakuan, pengukuran, klasifikasi, dan pencatatan transfer belanja. Namun, terdapat perbedaan dalam pengakuan dan pengukuran belanja antara LRA BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara dengan PSAP Nomor 02.

Tabel 8. Perbandingan surplus/defisit (LRA) BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA BPKAD kepulauan Sula	Keterangan
Penyajian	Penyajian Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.	BPKAD mencatat apa saja yang menjadi selisih dalam penyajian laporan realisasi dan anggaran dalam instansi	Sesuai

Sumber : Hasil Olahan data, 2023

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyajian laporan realisasi dan anggaran Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dimana dalam setiap pencatatannya Instansi telah menguraikan secara detail dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah¹. Nomor pertama

5.2 Saran

Peneliti juga akan memberikan saran kepada instansi terkait yaitu Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara untuk terus mempertahankan penerapan yang sudah ada sehingga kedepannya dalam penyajian pelaporan tidak mengalami kesalahan. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara perlu memperkuat SDM dan teknologi, memastikan ketepatan pencatatan transaksi, dan mengatasi kompleksitas sistem akuntansi sebagai upaya memastikan bahwa laporan realisasi dan anggaran dapat disajikan dengan baik dan akurat. Uraian hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus merupakan ringkasan temuan ilmiah dan bukan merupakan penyajian data yang sangat rinci. Harap dibedakan dengan jelas antara hasil atau temuan dari penelitian Anda dengan temuan dari publikasi sebelumnya oleh peneliti lain.